

## PEMETAAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI PEMILIH DI KABUPATEN BANTUL

Sakir<sup>1</sup>  
Suranto<sup>2</sup>  
Awang Darumurti<sup>3</sup>  
Tunjung Sulaksono<sup>4</sup>

### Abstrak

Pemilih di Indonesia sejak Pemilu 1999 s.d. pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pileg, terjadi penurunan partisipasi pemilih dari 93% (1999); 84% (2004); 71% (2009), pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik mencapai 75%. Sementara Partisipasi pada Pilpres mengalami penurunan dari 78% (2004); 73% (2009); dan 70% (2014). Fluktuasi partisipasi tersebut juga terjadi di DIY. Berdasarkan data rekapitulasi KPU DIY, partisipasi pemilih pada pileg 2009 tercatat 72,94%, namun pada pilpres 2009 naik menjadi 75,97%. Tingkat partisipasi pemilih di Bantul tertinggi (79,1%), naik lebih dari 5 % dari pileg (74,08%); Sleman (77,6%), naik sekitar 5% dari (72,7%); Gunungkidul (75,4%), naik tipis dari pileg (75,1%); Kulonprogo (73,5%), naik tipis dari pileg (73,4%); terakhir Kota Yogyakarta (69,2%). Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor pendukung dan penghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Untuk mendapatkan data menggunakan metode kualitatif dengan metode koleksi data: wawancara (*Snowball method*), FGD (*Focused Group Discussion*) dan Studi Dokumentasi. Secara umum, karena konsep kesadaran politik masyarakat yang belum tepat (karena menganggap partisipasi dalam pemilu adalah sebuah kewajiban) justru membuat partisipasi di Kabupaten Bantul Tinggi. Afiliasi politik orang terdekat mempunyai pengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Partisipasi politik, pemilih, dan Pemilu.*

### Pendahuluan

Pemilu merupakan elemen penting dari demokrasi. Bahkan dalam banyak teori demokrasi, pemilu menjadi salah satu indikator untuk mengukur kualitas demokrasi (Dahl, 1971:3; Schumpeter, 1976:260; Nielsen, 1991:5). Sebagai konsekuensi dari sebuah negara demokrasi, Indonesia pasca Orde Baru telah menyelenggarakan empat kali pemilihan umum legislatif secara reguler, yaitu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Untuk menegaskan azas presidensialisme, Indonesia kemudian juga melangsungkan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Selain itu, untuk memperkuat legitimasi kepala daerah serta menyelaraskan dengan asas presidensialisme pada pemerintahan nasional, Indonesia sejak 2005 juga telah menyelenggarakan pemilu kepala daerah secara langsung.

Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan, namun dunia internasional mengakui dan memuji, bahwa pemilu tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil, serta dipandang memenuhi standar demokrasi

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>3</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>4</sup> Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

global dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi, yang mencapai 92,7%. Demikian juga pemilu-pemilu selanjutnya menuai pujian serupa, bahwa pemilu di Indonesia berlangsung secara relatif damai, jujur dan adil, yang menunjukkan kualitas atau taraf demokrasi di Indonesia. Fakta ini memperkuat asumsi bahwa Indonesia dinilai telah melakukan suatu lompatan demokrasi (Soebagio, 2008).

Partisipasi pemilih di Indonesia sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Fluktuasi tersebut juga bisa dilihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih secara nasional pada Pemilu Legislatif 2009, tingkat partisipasi pemilih Pilpres 2009 di DIY justru mengalami kenaikan. Partisipasi pemilih pilpres di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dibanding pemilu legislatif 2009. Berdasarkan data rekapitulasi KPU DIY, partisipasi pemilih pada pemilu legislatif tercatat 72,94 persen, namun pada pemilu presiden 2009 naik 3 persen menjadi 75,97 persen. Dari semua kabupaten/kota tercatat bahwa tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Bantul tercatat paling tinggi, yaitu 79,1 persen, naik lebih dari 5 persen dari pileg, yaitu 74,08 persen. Kemudian disusul Sleman dengan persentase partisipasi 77,6 persen naik dari 72,7 persen, Gunungkidul 75,4 persen lebih tinggi dari pileg 75,1 persen. Kabupaten Kulonprogo 73,5 persen, naik tipis dari pileg 73,4 persen. Paling rendah yaitu Kota Yogyakarta 69,2 persen. Kenaikan partisipasi tersebut berbalik dari tren Pilpres 2004. Pada 2004, tren-nya menurun mulai dari pileg, pilpres putaran pertama, dan pilpres putaran kedua kembali menurun.

Meskipun angka partisipasi pemilih dalam pemilu presiden (pilpres) di DIY menurun dibanding saat pemilihan legislatif, namun secara nasional partisipasi pemilih DIY paling unggul. Angka partisipasi Pilpres tahun 2014 juga masih lebih tinggi sekitar 4 persen jika dibandingkan saat Pilpres 2009. Bahkan khusus untuk Bantul, angka partisipasi dalam pilpres 2014 naik sedikit menjadi 81,3 persen jika dibandingkan dengan pemilu legislatif di tahun yang sama. Meskipun naik dibandingkan pemilu presiden tahun sebelumnya, namun peringkat pertama tahun 2014 diduduki Sleman yang mencapai 81,7% atau naik hampir empat persen dibanding pilpres 2009.

Meskipun tingkat partisipasi di kabupaten Bantul cenderung mengalami kenaikan, sama seperti kecenderungan di kabupaten/kota lain di wilayah DIY, akan tetapi jika dicermati masih terdapat kesenjangan antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain yang cukup besar. Sebagai contoh misalnya, di Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan pada Pileg 2014 lalu

tingkat partisipasinya mencapai 87,7 persen, sementara di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan hanya mencapai 74.3%. Kesenjangan tersebut juga terlihat jika dicermati data per desa dalam satu kecamatan.

Melihat realitas tersebut, maka penelitian ini mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul, sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi suatu pola tertentu dari faktor-faktor tersebut yang kemudian diharapkan dapat memberikan input bagi pengembangan strategi dan kebijakan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bantul, terutam Komisi Pemilihan Umum, dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemilu dan Demokrasi**

#### **a. Kedudukan Pemilu dalam Demokrasi**

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada Negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka Negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik yang ditandai dengan terjadinya berbagai kecurangan, deskriminasi, dan manipulasi maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi (Hendrik, 2010).

Di Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk

kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya (Hendrik, 2010).

## **b. Fungsi Pemilu**

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. *Pertama*, pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.

*Kedua*, pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

*Ketiga*, pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin atau rotasi kekuasaan secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

*Keempat*, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa atau pemimpin politik dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

*Kelima*, pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

## **2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Huntington dan Nelson (1994:4) memaknai partisipasi politik sebagai:

*“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective.”*

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga Negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:

### *1) Status sosial dan ekonomi*

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik (Surbakti, 1992).

### *2) Situasi*

Menurut Ramlan Surbakti, situasipolitik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga,kehadiran orang lain, keadaan ruang,suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992).

### *3) Afiliasi politik orang tua*

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasipolitik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan

bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992).

#### 4) *Pengalaman berorganisasi*

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpolakan dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama (Simangunsong, 2004).

#### 5) *Kesadaran politik*

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010).

#### 6) *Kepercayaan terhadap pemerintah*

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010).

#### 7) *Stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi Informal (Hendrik, 2010)*

Peran media dalam mensosialisasikan pemilu juga dianggap merupakan faktor penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam suatu pemilu. Dengan terinformasikannya pemilu secara luas terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan serta cara pemilihan serta informasi yang lain terkait dengan pemilu, maka akan berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang pemilu yang akan berdampak terhadap partisipasi itu sendiri. Tidak kalah penting dari sosialisasidi media, diskusi-diskusi tentang pemilu yang dilakukan secara ringan dan informalpun dianggap punya andil dalam mengakumulasi pengetahuan masyarakat tentang pemilu, yang semua itu pada gilirannya akan diharapkan berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu.

## **Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Kualitatif**

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada

pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk mengetahui peta partisipasi dan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul, peneliti memerlukan analisis mendalam terkait fenomena tersebut. Peneliti perlu mengidentifikasi sejauh mana partisipasi politik masyarakat dalam berbagai tahapan pemilu dan rasionalitas dari sikap tersebut.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

### **a) Wawancara**

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

### **b) Dokumen**

Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

### **c) Focused Group Discussion (FGD)**

FGD dilaksanakan sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam riset ini, terutama dalam tahap akhir riset sebagai tools atau mekanisme untuk mengkonfirmasi hasil temuan di lapangan. FGD akan menghadirkan para pelaku pemilu, perwakilan

pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang dipandang relevan dalam memberikan informasi bagi penelitian ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bantul, dengan rasionalisasi sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Bantul yang terdiri atas 17 kecamatan dan 75 desa diklasifikasikan ke dalam 3 karakteristik wilayah, yaitu wilayah sub-urban, wilayah pegunungan dan wilayah pesisir. Wilayah urban diwakili oleh Kecamatan Banguntapan, wilayah pegunungan diwakili oleh Kecamatan Imogiri dan wilayah pesisir diwakili oleh Kecamatan Sanden. Setiap kecamatan akan diambil dua desa sebagai *representative sample*, yaitu desa dengan partisipasi tertinggi dan desa dengan partisipasi terendah. Ketiga karakteristik tersebut akan dikontrol oleh kecamatan Pajangan yang secara geografis merupakan wilayah pegunungan yang medannya cukup sulit, akan tetapi justru tingkat partisipasinya termasuk tertinggi di Kabupaten Bantul.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kecamatan Banguntapan**

Salah satu yang melatarbelakangi partisipasi adalah latar belakang pendidikan yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Ini dapat dilihat dari Desa Jambidan dan Banguntapan yang rata-rata memiliki pendidikan terakhir SLTA dan Sarjana. Selain itu ditemui juga masyarakat yang memiliki pendidikan terakhir SLTP tetapi pengetahuan politik dan alasan berpartisipasi cukup baik karena pengalaman organisasi sebagai aparat pemerintah seperti terlibat dalam Badan Permusyawaratan Desa (*Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bpk. H. Sabardi Desa Banguntapan pada Senin, tanggal 25 Mei 2015 pukul 14.30 WIB*).

Alasan lain yang mendasari ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah memiliki kesadaran politik. Pada Desa Jambidan masyarakat cenderung menganggap bahwa berpartisipasi adalah kewajiban. Anggapan bahwa kewajiban sebagai masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik dan bertanggungjawab kepada Negara terutama dalam pemilihan presiden. Sementara dalam Pemilihan legislatif alasan yang mendasari adalah memprioritaskan dengan memilih Caleg yang berasal dari daerah yang sama. Dengan alasan bahwa Caleg tersebut mampu membangun dan memahami kondisi daerah. Sementara pada Desa Banguntapan kesadarannya masih rendah, banyak masyarakat pendatang yang tidak



mengurus surat pindahan untuk dapat memilih di TPS Desa Banguntapan. Hal inilah yang menyebabkan partisipasi di Banguntapan masih rendah.

Pertimbangan yang digunakan dalam memilih parpol adalah memilih sesuai dengan visi misi dari Parpol. Namun kepercayaan kepada Parpol sangat rendah karena baginya memilih figur melalui bukti nyata untuk mau terjun ke masyarakat jauh lebih penting. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhduido Desa Jambitan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 18.30 WIB). Namun ada juga yang beranggapan bahwa partai politik pada pemilu 2014 lalu sudah memiliki visi dan misi yang baik, sementara figur politik tidak mampu mewujudkan visi dan misi parpol tersebut, upaya untuk perbaikan kualitas dari aktor politik sangat diharapkan dari masyarakat (*Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Phutut Damarjati Desa Banguntapan pada Senin, 25 Mei 2015 pukul 13.00 WIB*).

Dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu, orang terdekat sangat lah berpengaruh. Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman (Surbakti, 1992). Namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil wawancara informan bahwa dalam pengambilan keputusan pemilu 2014, walaupun ada teman yang ikut dalam caleg dan meminta ajakan untuk memilih, hal itu sangat tidak berpengaruh, karena melihat kinerja dari caleg dalam kehidupannya jauh lebih penting alasan yang mendasari untuk memilih. (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu S. J. Eka Kurniawati Desa Banguntapan pada Minggu, 24 Mei 2015 pukul 16.00 WIB). Hal ini juga dikuatkan dengan anggapan bahwa dalam pengambilan keputusan pemilu 2014 walaupun banyak meminta dukungan, tetapi tetap memilih untuk netral (*Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bpk. H. Sabardi Desa Banguntapan pada Senin, tanggal 25 Mei 2015 pukul 14.30 WIB*).

## **2. Kecamatan Sanden**

Alasan yang mendasari partisipasi dalam pemilu berdasarkan jawaban dan penjelasan dari narasumber dengan berbagai macam tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa di desa GadingSari, Gading Arjo, dan Murti gading, seluruh narasumber telah mengikuti Pemilu pada tahun 2014 kemarin. Mereka memahami bahwa Pemilu itu penting dan seluruh narasumber mengatakan tujuan utama mereka mengikuti Pemilu adalah untuk memilih pemimpin. Alasan lain yang dikemukakan oleh seluruh narasumber secara garis besar mengatakan bahwa mereka mengikuti Pemilu karena mereka menyadari posisinya sebagai warga negara yang

harus berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa narasumber sudah memiliki kesadaran dari diri mereka sendiri untuk mengikuti Pemilu.

Kondusifitas situasi lingkungan pemilu di ketiga desa tersebut, baik menjelang Pemilu, pada saat pelaksanaan Pemilu, serta pasca Pemilu. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kondisi dan situasi di ketiga desa tersebut menjelang Pemilu ternyata kondusif, aman, dan tenang. Tidak ada kegaduhan atau keributan yang disebabkan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu, Sedangkan salah seorang narasumber yakni Dasuki dari Desa Gading Arjo mengatakan bahwa di TPS 1 Gading Arjo, Sanden, Bantul terjadi kegaduhan akibat salah seorang saksi datang terlambat pada saat Pemilu berlangsung.

Afiliasi politik orang terdekat tidak terlalu berpengaruh di desa Gading Arjo, maupun Gading Sari. Dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu mereka menggunakan hak pilih secara bebas tanpa adanya intimidasi ataupun desakan dari pihak manapun, baik dari rekan terdekat ataupun oknum-oknum tertentu untuk memilih suatu partai politik atau calon tertentu.

Kesadaran politik tentang pemilu (hak atau kewajiban) masyarakat dari tiga desa kecamatan sanden ini mereka memiliki pendapat bahwa menurut responden kebanyakan dari narasumber menjawab bahwa berpartisipasi pemilu itu merupakan hak dan kewajiban, karena ketika berbicara tentang hak Pemilihan Umum untuk seorang pemimpin, rakyat memiliki hak untuk memberikan pilihan sebagai Negara Demokrasi, namun, sebagaimana narasumber memiliki pendapat dalam pemilihan umum yakni merupakan suatu kewajiban karena setiap negara yang baik, wajib memiliki seorang pemimpin karena dengan pemimpin nanti yang akan menentukan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yang diajarkan oleh setiap agama.

### **3. Kecamatan Imogiri**

Berdasarkan temuan di masyarakat pengaruh tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 di kecamatan Imogiri adalah tingginya tingkat partisipasi dikarenakan tingkat pendidikan yang cukup baik, sosialisasi intensif oleh RT, PPS, RT harus dijalankan optimal caranya adalah dengan menjadikan ketua RT/RW menjadi KPPS, sumber daya manusia yang baik, tingginya afiliasi terhadap orang terdekat, wilayahnya kecil hanya terdiri dari 9 (sembilan) TPS. Kesadaran yang tinggi serta situasi yang kondusif sebagaimana di dalam teori yang menyebabkan seseorang mau atau tidaknya berpartisipasi dalam politik menurut Surbakti, 1992.

Sedangkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan oleh tingkat kejenuhan masyarakat yang sering diberi janji-janji oleh calon legislatif yang tidak ditepati, waktu yang

terlalu singkat dalam pemilihan (hanya sampai pukul 12.00), letak geografis, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya perantau yang tidak mudik saat pemilihan umum,, masyarakat yang sudah meninggal masih dimasukkan dalam data, tidak punya nomor induk kependudukan, dan kesalahan pendataan seperti, masyarakat yang sudah meninggal masih dimasukkan dalam data serta tidak punya nomor induk kependudukan. Sedangkan temuan menarik dari justifikasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa/Bupati bisa memastikan bahwa tingkat partisipasi di desa Sriharjo dipastikan akan naik tajam karena dipandang berimplikasi terhadap pembangunan desa dan dipandang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk para perantau yang akan pulang ketika adanya pemilihan kepala desa/bupati (Masyarakat relatif rasional sehingga memilih atau menghitung perlunya atau tidak perlunya datang ke TPS). *(Hasil wawancara dengan Suryadi, Minggu 24 Mei 2015 pukul 10.10, Sugeng Parjianto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 11.20, Basharudin, Minggu 24 Mei 2015 pukul 17.15 dan Budi Purwanto, Minggu 24 Mei 2015 pukul 16.00, Pramono Harianto, Minggu 24 Mei 2015 puku 14.30).*

#### **4. Kecamatan Pajangan**

Kecamatan Pajangan tersebut bisa memperoleh tingkat partisipasi yang tinggi didasarkan atas beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilu. "Masyarakat beranggapan bahwa pemilu ini adalah suatu kewajiban dilihat dari bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang demokrasi. Demokrasi ini dibuktikan dengan adanya pemilihan umum dan masyarakat wajib dalam pelaksanaannya", Kata Bapak Teguh (salah satu masyarakat Desa Guwosari). Selain faktor kesadaran masyarakat, faktor yang mendasari adalah "keinginan masyarakat untuk mensukseskan pemilu", kata Bapak Slamet (salah satu Masyarakat Desa Sendangsari). Selain itu, "masyarakat beranggapan sebagai masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilu", Kata Bapak Kawid (salah satu masyarakat Desa Triwidadi). Namun dari pelaksanaan pemilu ini, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu di Kecamatan Pajangan ini masih didominasi oleh kontrol sosial masyarakat yang tinggi.

Pelaksanaan pemilu yang berlangsung di Kecamatan Pajangan dan ketiga desa yang ada di Kecamatan Pajangan ini bisa dikategorikan aman dan kondusif. Hal ini terlihat tidak adanya hal – hal atau tindakan – tindakan yang mengganggu atau membuat keributan dalam pelaksanaan dalam pemilihan umum tersebut. Akan tetapi, "situasi yang dirasakan kondusif hanya terkesan terlihat oleh kasat mata, karena pada saat pemilu tersebar banyak-banyak isu-isu tentang kecurangan ditengah-tengah masyarakat seperti pembelian TPS oleh salah satu

calon kandidat”, Kata Bapak Teguh (salah satu masyarakat Desa Guwosari. Selain itu, “dalam dinamika pemilihannya masih ada terjadi kekeliruan dalam perhitungan suara yang diakibatkan human error atau petugas mengalami kelelahan”, Kata Bapak Zandaru (salah satu warga Desa Triwidadi) dan ada juga terjadi tertukarnya surat suara yang seharusnya pada dapil kasihan nanum masuk di Desa Triwidadi dan adanya tiga surat suara yang telah di coblos namun kejadian ini telah di masukan kedalam berita acara”, Kata Bapak Kawid (salah satu warga Desa Triwidadi).

Dalam hal masyarakat melakukan pengambilan keputusan dalam pemilihan umum di Kecamatan pajangan ini, tidak adanya pengaruh dari orang – orang terdekat. “Memilih dalam pemilu itu sendiri kebebasan tersendiri supaya tidak ada yang saling rebutan dan bertengkar”, Kata Bapak Slamet (salah satu warga Desa Sendangsari). Namun. “tidak menutup kemungkinan pengaruh yang dihadapi oleh masyarakat pasti ada, terlebih lagi pengaruh dari partai politik yang berkampanye” Kata Bapak Teguh (salah satu warga Desa Guwosari).

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Di Kabupaten Bantul

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan resume beberapa faktor determinan partisipasi pemilih di Bantul. Adapun detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel .1**  
**Faktor Determinan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul**

KECAMATAN	DESA	FAKTOR DETERMINAN
Bangun-tapan	Banguntapan (Tingkat Partisipasi Rendah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mobilitas penduduk tinggi ( banyak warga yang bekerja di luar wilayah)</li> <li>2) Mayoritas penduduk merupakan warga pendatang</li> <li>3) Caleg kurang / tidak dikenal warga</li> <li>4) Rasionalitas memilih masyarakat tinggi (Caleg terlalu banyak janji )</li> <li>5) Pemutakhiran data bermasalah sebagai akibat dari data demografis yang sangat dinamis</li> </ol>
	Jambidan (Tingkat Partisipasi Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mayoritas masyarakat menganggap hak memilih dalam pemilu adalah kewajiban yang harus dilakukan</li> <li>2) Situasi lingkungan yang egaliter dan terbuka</li> <li>3) Mobilitas penduduk rendah</li> <li>4) Afiliasi politik orang terdekat (Caleg mantan lurah)</li> </ol>
Sanden	Gadingsari (Tingkat Partisipasi Rendah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pragmatisme (manfaat menggunakan hak pilih tidak imbang dengan penghasilan yang seharusnya didapatkan jika bekerja)</li> <li>2) Mobilitas masyarakat tinggi karena profesinya sebagai nelayan.</li> <li>3) Intensitas sosialisasi kurang karena warga tidak mudah dikumpulkan)</li> </ol>
	Gadingharjo (Tingkat Partisipasi Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intensitas dan inovasi sosialisasi yang tinggi.</li> <li>2) Mobilitas penduduk rendah</li> <li>3) Afiliasi politik orang terdekat</li> </ol>
Imogiri	Imogiri (Tingkat Partisipasi Tinggi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mobilisasi oleh PPS yang juga pengurus lembaga kemasyarakatan.</li> <li>2) Luas wilayah relatif kecil</li> <li>3) Ada afiliasi politik dengan orang terdekat</li> </ol>
	Sriharjo (Tingkat Partisipasi Rendah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kejenuhan masyarakat atas pelaksanaan Pemilu yang sering namun manfaat langsung yang diperoleh dari pemilu legislatif tidak signifikan. (Perantau lebih memilih Pilkada/Pilkades daripada Pileg).</li> <li>2) Pemutakhiran data bermasalah karena PPS</li> </ol>

		<p>kurangmemahamikondisiadministrasikependudukansetempat (PPS tidak melibatkan pengurus RT yang mengetahui dengan baik lokasi tersebut)</p> <p>3) Sosialisasi yang dilakukan kurang dan tak menarik.</p> <p>4) Masyarakatrelatifrasionalsehinggamemilihataumenghitungperlunyaatautidakperlunyadatangke TPS</p>
<b>Pajangan</b>	<b>Tridiwidadi (Tingkat Partisipasi Tinggi)</b>	<p>1) Masyarakat menganggap pemilu sebagai kewajiban (Kontrol sosial )</p> <p>2) Ikatan sosial di masyarakat yang tinggi</p> <p>3) Stimulan partisipasiintensif (kolektif)</p> <p>4) Manfaat yang diperoleh jelas (terutama dari pemilukada dan Pilkades )</p>

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan tingginya partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul adalah: (a) Afiliasi politik dengan orang terdekat ; (b) stimulus partisipasi; (c) kontrol sosial yang ketat, sehingga perilaku tidak menggunakan hak pilih akan dianggap “ora umum”(d) pragmatisme politik masyarakat yang terkoordinasi oleh lembaga RT/Dukuh terjadi untuk mobilisasi pemilih; (e) Kepedulian kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak memilih dalam Pemilu adalah: (a) Kejenuhan dan kurangnya manfaat langsung pelaksanaan Pemilu; (b) Keterbatasan sosialisasi serta kurangnya inovasi sosialisasi yang menarik bagi masyarakat; (c) Kinerja pemutakhiran data oleh penyelenggara Pemilu belum optimal, terutama di wilayah yang luas dan mobilitas penduduknya tinggi (d) Cakupan luasnya wilayah serta tingginya mobilitas penduduk menyebabkan pemutakhiran data menjadi isu krusial; (e) ikatan dan kontrol sosial lemah. (f) pragmatisme masyarakat yang memandang ikut pemilu tidak mendapatkan manfaat langsung (lebih berat ke pekerjaan).

Maka rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, yaitu Pertama, perlu ditempuh upaya penyadaran yang tepat kepada warga masyarakat, agar sebagai pemilih dapat memandang pemilu sebagai hak dan bukan sebagai kewajiban sehingga pelaksanaan Pemilu diharapkan akan lebih berkualitas. Kedua, perlu modifikasi sosialisasi yang inovatif, kreatif dan masif sebelum penyelenggaraan pemilu. Ketiga, perlu upaya inovasi peningkatan partisipasi pemilih berdasar lesson learnt yang ada, misalnya: Desa Selo Pamioro yang menjalankan sistem Angkut Pemilih, bisa diaplikasikan di seluruh Bantul. Khusus Desa Banguntapan, perlu ada treatment khusus dari KPU guna membackup kapasitas dan kuantitas penyelenggara Pemilu yang ada.

## Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi
- Huntington, Samuel P & Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nielsen, Hans-Jorgen, 1991. *The Chilean Process of Transition*, Aarhus: University of Aarhus, Institute of Political Science
- Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008, *Jurnal Demokrasi* No. 138 Vol. IX No. 2
- Rush, Michael & Phillip Althof, 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Schumpeter, Joseph. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York : Harper.
- Simangunsong, Bonar. 2004. *Negara. Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional*. Jakarta: Gramedia
- Soebagio, 2008. Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Makara*, Vol. 12 No. 2, Desember
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia